

**Penolakan Masyarakat Tibet terhadap Kebijakan Integrasi Tiongkok pada
Era Pemerintahan Xi Jinping**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Lodro Jyalshen Armando

NIM 071811233083

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

SEMESTER GENAP 2022/2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/ atau universitas lain, serta tidak pernah dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.

Surabaya, 10 Juni 2022

Lodro Jyalshen Armando

**Penolakan Masyarakat Tibet terhadap Kebijakan Integrasi Tiongkok pada
Era Pemerintahan Xi Jinping**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dengan
gelar Sarjana Hubungan Internasional (S. Hub. Int.) pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.**

Disusun oleh:

Lodro Jyalshen Armando

NIM 071811233083

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SEMESTER GENAP 2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN



Skripsi Berjudul

**Penolakan Masyarakat Tibet terhadap Kebijakan Integrasi Tiongkok pada
Era Pemerintahan Xi Jinping**

Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Penguji

Surabaya, 10 Juni 2022

Dosen Pembimbing

Ahmad Safril Mubah, S.IP., M.Hub.Int. Ph.D.

NIP. 198109172014041001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Dr. Phill. Siti Rokhmawati Susanto, S.IP., MIR.

NIP. 197703012000032001

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
pada hari 20 Juni 2022, pukul 08.00 WIB
Ujian diadakan secara daring**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Airlangga

Komisi Penguji,

Ketua,

M. Muttaiyien, S.I.P. MA., Ph.D.
NIP. 197301301999031001

Anggota,

Anggota,

Irfa Puspitasari, S.IP., MA.
NIP. 198503252010122002

Lilik Salamah, Dra., M.Si
NIP. 195605071986012001

Kata Pengantar

Skripsi dengan judul Penolakan Masyarakat Tibet terhadap Kebijakan Integrasi Tiongkok pada Era Pemerintahan Xi Jinping tercipta karena penulis memiliki keingintahuan terhadap perkembangan relasi Tibet dengan Tiongkok. Tibet dan Tiongkok memiliki sejarah yang kurang mengenakan karena pada tahun 1959 terjadi pemberontakan masyarakat Tibet terhadap pemerintahan Tiongkok dan hingga sekarang yaitu era kepresidenan Xi Jinping hubungan kedua pihak belum mencapai titik tengah. Berbagai gerakan penolakan seperti protes, demonstrasi, dan lain-lain kerap terjadi di Tibet untuk menolak implementasi kebijakan integrasi Tiongkok di Tibet dalam rangka asimilasi etnis Tibet terhadap Tiongkok.

Untuk itu, pada tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan dan implementasi pemerintahan Tiongkok dalam rangka integrasi etnis Tibet di Tiongkok. Setelah itu, tulisan ini membahas mengenai penolakan atas kebijakan yang diimplementasikan, bagaimana implementasi kebijakan menyebabkan penolakan dan ada kepentingan apa dibalik penolakan itu. Penulis tertarik karena Tiongkok sudah mempunyai infrastruktur yang didirikan untuk kemajuan Tibet, namun penolakan masih terjadi. Infrastruktur dan pembangunan yang seharusnya membawa manfaat untuk masyarakat Tibet, ditentang oleh masyarakat Tibet itu sendiri. Penulis juga tertarik apakah Tiongkok mendengarkan keinginan Tibet yang sebenarnya sehingga pembangunan yang dibangun tidak salah sasaran.

Dalam tulisan ini, penulis mendapat beberapa hal penting mengenai kepentingan Tibet yang menyebabkan penolakan terjadi terhadap Tiongkok dan/atau Partai Komunis Tiongkok era Xi Jinping. Penulis juga akan memberi pernyataan-pernyataan masyarakat Tibet mengenai implementasi kebijakan Tiongkok yang membuat penolakan terjadi. Penulis juga akan memaparkan kebijakan dan implementasi Tiongkok terhadap wilayah Tibet.

Abstrak

Hubungan Tibet dengan Tiongkok sejak *Tibetan Uprising* tidak berjalan lancar karena ada berbagai kepentingan yang berbeda di antara kedua pihak. Tiongkok mempunyai kebijakan integrasi untuk asimilasi etnis Tibet terhadap Tiongkok yang ditolak oleh masyarakat Tibet karena implementasi yang tidak sesuai harapan masyarakat Tibet. Penolakan terjadi hingga saat ini yaitu era kepemimpinan Xi Jinping sebagai presiden Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok membuat kebijakan dengan istilah Sinifikasi yaitu integrasi etnis minoritas terhadap etnis mayoritas Tiongkok yaitu etnis Han. Tiongkok mempunyai tujuan yaitu untuk stabilitas nasional, termasuk di dalamnya mengurangi gerakan separatisme etnis minoritas seperti Tibet dan Uyghur. Tujuan Tiongkok sendiri dalam hal ini untuk mencegah perpecahan dengan membangun infrastruktur dan ekonomi di wilayah etnis minoritas termasuk Tibet di dalamnya, namun masyarakat Tibet tetap menolak kehadiran Tiongkok yang mempunyai tujuan baik untuk mereka. Masyarakat Tibet mempunyai kepentingan dan mereka merasa dirugikan oleh pembangunan ini.

Hal ini menimbulkan pertanyaan untuk penulis karena Tiongkok sudah membangun ekonomi dan infrastruktur untuk perkembangan ekonomi Tibet, namun penolakan tetap terjadi. Pertanyaan itu seperti, mengapa penolakan terjadi, apa penyebab dari penolakan itu, kebijakan integrasi Tiongkok apa yang ditolak dan menyebabkan kerugian masyarakat Tibet dalam integrasi etnis Tibet terhadap Tiongkok, dan apa keinginan dan kepentingan masyarakat Tibet terhadap pemerintahan Tiongkok dan/atau Partai Komunis Tiongkok, khususnya era Xi Jinping.

Kata Kunci: integrasi, etnis, minoritas, Tibet, Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat	ii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan Dewan Penguji.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Tinjauan Pustaka	3
1.4.1 Kebijakan Etnis era Xi Jinping	3
1.4.2 Represi Otoritas Tiongkok terhadap Masyarakat Tibet	5
1.4.3 Sinifikasi Etnis di Tiongkok	7
1.5 Teori dan Konsep	8
1.5.1 Integrasi Sosial.....	8
1.5.2 Asimilasi Sosial	9
1.5.3 Penyebab Pergerakan atau Protes Etnis	10
1.6 Hipotesis	11
1.7 Metodologi	12
1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional	12
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.7.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.	15

1.7.4 Teknik Analisis Data.....	15
1.7.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II Kebijakan Tiongkok untuk Integrasi Budaya Tibet	16
2.1 Kebijakan Pembangunan di Tibet oleh Pemerintahan Tiongkok.....	16
2.2 Kebijakan Internet	19
2.3 Kebijakan Agama, Edukasi, dan Ideologi	21
2.4 Kebijakan untuk Biarawan/Bhiksu.....	23
2.5 Kebijakan Urbanisasi	25
2.6 Kebijakan Pernikahan etnis Tibet dengan etnis Han.....	26
2.7 Kebijakan Pengawasan.....	27
2.8 Larangan Terhadap Dalai Lama dan Masyarakat yang Mengikutinya	28
2.9 Kesimpulan.....	29
BAB III Kepentingan Masyarakat Tibet.....	31
3.1 Isu Budaya.....	31
3.2 Pencemaran Lingkungan	34
3.3 Implementasi Kebijakan yang Tidak Sesuai	36
3.4 Tindakan Represif dan Semena-mena Pemerintahan dan Pihak Berwajib Tiongkok kepada Masyarakat Tibet	37
3.5 Isu Diskriminasi	40
3.6 Isu Hak Asasi Manusia.....	41
3.7 Keinginan Masyarakat Tibet atas Dalai Lama	43
3.8 Pengawasan Pemerintahan yang Terlalu Ketat	44
3.9 Kesimpulan.....	45
BAB IV Kesimpulan.....	47
Daftar Pustaka	53